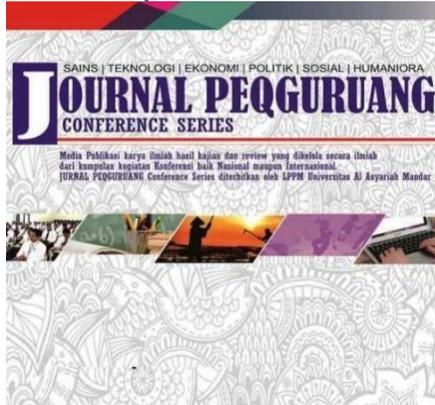


### Graphical abstract



## PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN CAMPALAGIAN

<sup>1\*</sup>Chuduriah Sahabuddin, <sup>2</sup>Abdul Latief, <sup>3</sup>Anwar

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author

[Anwarhusein777@gmail.com](mailto:Anwarhusein777@gmail.com)

### Abstract

This study discusses the role of political parties in conducting political education in Campalagian District. This research is motivated by the lack of understanding of the public about a good political culture marked by the many frauds occurring in political activities, as well as the invisible role of political parties as implementers of political education in society. The purpose of this study is to reveal how the role of political parties in the campalagian district. This type of research is descriptive qualitative, which describes or depicts the object of research based on the facts that appear. The informants in this study were cadres and community leaders who understood politics. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that political parties have not yet conducted political education so that people's understanding of good political culture is lacking.

**Keywords:** *Role; Political Parties; Political Education*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kecamatan Campalagian. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurang pemahannya masyarakat mengenai budaya politik yang baik ditandai dengan banyaknya terjadi kecurangan dalam kegiatan politik, serta tidak terlihatnya peran partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana peran partai politik di kecamatan campalagian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Informan dalam penelitian ini adalah kader dan tokoh masyarakat yang paham mengenai politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pendidikan politik sehingga pemahaman masyarakat tentang budaya politik yang baik menjadi kurang.

**Kata Kunci:** *Peran; Partai Politik; Pendidikan Politik*

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1277>

Received: 09 Agustus 2020 | Received in revised form: 27 Septembe 2020 | Accepted: 17 November 2020

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang tak terlepas dari kehidupan politik sejak mula berdirinya. Kata politik merupakan bahasa Yunani, yaitu *polis* dan artinya kota. Dari kata itu berubah menjadi *polites* artinya adalah warga Negara juga konsep *politicos* yang artinya kewarganegaraan. Berdasarkan penjelasan tersebut akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya politik merupakan suatu hal yang berhubungan antara warga Negara dengan sebuah Negara. "Politik bersifat ambivalen. Disisi lain politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, dimana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan kekuasaan terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Konflik dan perebutan kekuasaan itu biasanya terjadi akibat persaingan antara beberapa partai politik.

Keberadaan partai politik tak mampu dijauhkan dari sistem kehidupan dalam demokrasi. Parpol adalah sesuatu yang menjadi salah satu tonggak demokratis di seluruh Negara. Sehingga dengan adanya partai politik keinginan dan tuntutan warga Negara bisa terlaksana atau di usahakan sebab itulah yang menjadi tugas partai politik didalam suatu Negara. Berdasarkan hal seperti itu partai perlu melaksanakan beberapa fungsi yang sudah menjadi kewajiban mereka, seperti penghubung antara pemerintah dengan masyarakat luas, pemilihan kandidat, mengorganisasikan pemerintah, memilih akuntabilitas, pendidikan politik, dan konflik sosial.

Di masa repormasi seperti saat ini partai politik dalam masalah besar. Partai politik dimata masyarakat memiliki pandangan yang tidak baik, semua itu disebabkan karena parpol belum atau tidak malksanakan fungsinya seperti apa yang menjadi mestinya sehingga rakyat melihatnya kurang berjalan baik. Partai tidak bisa atau tak memiliki kebiasaan dalam melakukan fungsinya juga dalam keterwakilannya sebagai wakil rakyat dalam menghubungkan warga Negara dengan pemerintahan yang ada.

Kejadian-kejadian seperti ini juga dengan adanya masalah internal partai. Maksud dari internal, menurut hungtinton, merupakan proses perbaikan kondisi partai dalam sikap atau budaya masing-masing partai. Huntington menentukan sebenarnya bukan masalah berapa partai yang ada di sebuah Negara, tetapi sejauh mana ke kokohan dan adaptabilitas system kepartaian yang berlangsung. Percaya akademis bahwa peristiwa partai politik yang dipisah adalah suatu hasil suatu situasi di mana pihak gagal untuk menjawab kepada ketidak puasan antar anggota melalui/sampai pada partai politik. (Latief, 2010:404)

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Kegiatan partai politik sangat kurang berjalan di Kecamatan Campalagian dan money politik masih sering terjadi, money politik diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu. Imbalan tersebut

dapat berupa uang maupun barang tertentu. (Ananingsi, 2016:50). bahkan fungsi tentang pendidikan politik seperti tidak ada sama sekali. Sebagian masyarakat tentu tidak tahu bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi partai politik, sebab mereka hanya memahami bahwa partai politik adalah organisasi yang berisi para aktor politik.

Jika melihat keadaan politik seperti diatas, tentu perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan politik untuk seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Kecamatan Campalagian yang masih sangat kurang tentang demokrasi dan pendidikan politik dalam bernegara.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Payerli Pasaribu yang berjudul Peranan Partai politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1173) "peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa".

Berdasarkan istilah kata parti itu berasal dari bahasan latin, yaitu *partire*, yang bermakna "membagi" atau "memilah" atau bisa juga disejajarkan dengan kata benda "part" dalam bahasa inggris bermakna bagian. Apabila "part" dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi "*to participate*", yang berarti turut ambil bagian .dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna "memilah" dan "turut ambil bagian." Dengan pengertian tersebut partai bisa dipahami sebagai "bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan."

Menurut pasal 1 ayat lundang-undang No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang NO.2 tahun2008 "partai politik" adalah organisasi yang sifatnya nasional yang didirikan oleh kelompok dari warga Negara Indonesia berdasarkan kesamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pacasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Berikut beberapa hal yang merupakan fungsi dari partai politik yang ada di Indonesia:

### a. Sarana Komunikasi Politik

Arus informasi di Indonesia bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas kebawah atau dari bawa keatas. Kedudukan partai dalam arus informasi ini adalah sebagai jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Tuntutan dan kepentingan anggota masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui suatu proses dari bawah keatas, atau suatu proses perumusan yang disebut "Artikulasi Kepentingan" (interest Articulation).

Apabila terdapat tuntutan yang sama dari berbagai kelompok, maka digabungkan menjadi satu, yaitu yang disebut dengan “Penggabungan Kepentingan” (*Interest aggregation*). Artikulasi dan penggabungan kepentingan ini dalam suatu sistem politik dapat merupakan masukan atau input bagi institusi-institusi yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat, pemerintah, dan sebagainya.

Masukan-masukan tersebut kemudian diolah dijadikan sebagai bahan “Public Policy”, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang kemudian menjadi output untuk masyarakat.

Dalam proses tersebut arus komunikasi adalah dari bawah keatas, yaitu input-input menjadi output. Tapi ada juga arus komunikasi dari atas kebawah yaitu dalam hal partai politik turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sehingga terjadi arus informasi dan dialog antar masyarakat dan pemerintah melalui perantara yang menghubungkan yaitu partai politik.

Dengan demikian peranan partai sebagai jembatan mengang peranan penting, karena disatu pihak kebijaksanaan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan, aspirasi, dan kehendak masyarakat.

Apabila semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan fungsinya maka dapatlah dikatakan perkembangan kehidupan politik sehat.

#### b. Sarana Sosialisasi Politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang akan memiliki sikap dan orientasi terhadap gejala politik yang berlaku dimana tempat orang itu berada. Proses itu berlangsung secara bertahap dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

#### c. Sebagai Sarana Recruitment Politik

Recruitment politik adalah proses pencarian anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berperan serta dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan organisasi lainnya, kesempatan untuk berperan dalam politik diperluas.

#### d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam Negara demokrasi yang masyarakat majemuk dan bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat merupakan suatu hal yang biasa. Akan tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah itu berdasarkan perbedaan etnik, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik, pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik, minimal memperkecil akibat-akibat negative yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.

Pada pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia N0m0r 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwa:

- 1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik menurut Sukarna (1994:84) bahwa: “Pendidikan politik (*political education*) merupakan *condition quo non* (suatu syarat mutlak) mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran ber negara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka, pendidikan politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan bangsa dan Negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.”

Sementara menurut Alfian (dalam Kartono, 2000: 97) menjelaskan: “Pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini, maka digunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesis (Moleong, 2006:11). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat bagaimana peran partai politik di Kecamatan Campalagian.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan kegiatan demokrasi masih kurang. Terdapat tiga desa yang

menjadi lokasi penelitian: kelurahan Pappang, Desa Kenje, dan Desa Bonde. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal Februari 2020 hingga April 2020.

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasi ialah seluruh masyarakat campalagian wajib pilih.

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan sampling yaitu purposive sampling sebuah teknik penunjukkan langsung terhadap populasi yaitu 75 orang masyarakat campalagian (25 orang setiap desa yang di ambil secara purposive sampling). Sementara Fokus penelitian dalam aspek masyarakat, yaitu dalam aspek pengetahuan tentang peran partai politik dan pendidikan politik.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian adalah observasi dan wawancara mendalam (*intensif interview*) untuk menggali informasi terkait peran partai politik di Kecamatan Campalagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat merupakan sasaran utama partai politik dalam melaksanakan tujuannya, baik itu dalam masa pemilu maupun dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pendidikan politik bagi masyarakat campalagian merupakan hal yang sangat diperlukan demi perbaikan budaya politik masyarakat campalagian, karena dengan adanya pendidikan politik khususnya di desa Kenje, Bonde, dan kelurahan pappang dapat membuat pandangan masyarakat terhadap partai politik menjadi lebih bagus.

Di Kecamatan Campalagian masyarakat cenderung memandang partai politik sebagai calon legislatif saja tanpa tahu tugas dan tanggung jawab sebenarnya dari partai politik. Partai politik juga hampir hanya mengadakan kegiatan ketika ada pemilu saja. Tentu diharapkan kebiasaan seperti itu bisa berubah kedepannya. Jika partai politik melaksanakan tugasnya dengan baik maka masyarakat pastinya memiliki pandangan baik terhadap partai politik.

Partai politik sering mengadakan kegiatan, namun bukan sosialisasi pentingnya pendidikan politik atau bahaya politik uang yang biasa kita kenal dengan money politik, akan tetapi lebih ke sosialisasi mengenai program-program pemerintah atau partai politik yang sebenarnya bisa juga hanya di sosialisasikan sendiri oleh aparat desa tanpa perlu diberitahukan langsung oleh partai.

Mengenai Hal Tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Irmansyah Kasi (staf desa bonde bagian perencanaan) yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pertain atau anggota politik hanya datang ketika ada keperluan tertentu seperti kampanye dan hal-hal lain tapi bukan untuk melaksanakan tugasnya dalam pendidikan politik, seharusnya mereka memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat agar kecurangan yang biasa terjadi tidak ada lagi karena masyarakat asal menerima uang saja. Selama saya bekerja disini belum ada sama sekali sosialisasi mengenai tentang bahayanya money politik, tapi justru yang banyak hanya penyuluhan-penyuluhan program dan sosialisasi rencana kerja dari partai politiknya.”

Wawancara juga dilakukan dengan Arialdi Rahman (Masyarakat kelurahan pappang) mengatakan bahwa:

“Untuk para kader kader politik yang ada di campalagian saya berharap kedepannya mereka bisa lebih memperhatikan keadaan yang ada di campalagian seperti pendidikan politiknya dan bisa memahami betul betul apa yang menjadi di campalagian ini sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat kedepannya untuk campalagian kedepannya. Saya berharap mereka bisa memperhatikan semua elemen elemen yang ada di campalagian sehingga campalagian bisa menjadi daerah yg lebih baik lagi kedepannya.”

Pendidikan politik merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seluruh partai politik yang ada di Indonesia, ini sangatlah penting karena partai dianggap sebagai organisasi yang mampu mengubah budaya politik di lingkungan masyarakat, oleh sebab itu partai politik seharusnya sering melaksanakan pendidikan politik di masyarakat.

Jika pendidikan politik dilakukan oleh partai politik maka mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan undang-undang partai politik mengenai pendidikan politik. Melihat ada beberapa partai politik yang ada di Campalagian, seharusnya sosialisasi mengenai pendidikan politik itu dilaksanakan di masyarakat.

Mengenai Hal Tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Muhammad Said (Tokoh pemuda kenje) yang mengatakan bahwa:

“Demokrasi di Campalagian sebenarnya bagus dalam bentuk kerja sama antar masyarakat, akan tetapi di masa-masa tertentu seperti pemilu masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh para calon legislative yang memanfaatkan uang dan janji untuk memperoleh suara. Hal itu membuktikan bahwa pengaruh dari para elit politik sangat mudah diterima masyarakat dengan uang.”

Wawancara juga dilakukan dengan Jusrianto (tokoh masyarakat kelurahan pappang) yang mengatakan bahwa:

“Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Jadi partai harus memerhatikan rekrutmen kader agar ada sedikit pendidikan politik bagi masyarakat hingga tidak timbul lagi yang namanya money politik.”

Mengenai hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan bapak HJ Mahyuddin Mahdi (kader Partai PPP) mengatakan bahwa:

“Keadaan demokrasi dicampalagian sebenarnya sudah bagus, tidak ada keributan ataupun perkelahian ketika pemilu. Akan tetapi money politik masih sering terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan partai politik dan hampir seluruh partai politik melakukan hal tersebut. Masalah pendidikan politik memang belum pernah diadakan meskipun itu perlu diadakan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai politik dan demokrasi, namun pendidikan politik saya rasa tidak penting sebab akan selalu sama sama saja hasilnya, karena ketika pemilu selesai maka semuanya akan kembali seperti semula.”

Segala sesuatu yang tercipta didalam lingkungan masyarakat merupakan suatu budaya yang melekat dalam diri masyarakat. Bidang politikpun juga merupakan suatu budaya, yang merupakan sebagai pola tingkah laku dari individu manusia dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Di masyarakat campalagian budaya politiknya bisa dikatakan mudah dimasuki kecurangan-kecurangan politik karena kurangnya pemahaman yang jelas mengenai politik yang bersih, ada juga yang sebenarnya paham bahwa apa yang dilakukan itu salah akan tetapi tetap dilakukan karena tuntutan ekonomi atau pun karena hal lain seperti hubungan keluarga. Hal-hal seperti itulah yang membuat budaya politik di campalagian susah berkembang ke arah politik yang lebihb seperti apa yang diharapkan.

Mengenai hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Ahmad (tokoh masyarakat kelurahan Pappang) yang mengatakan bahwa:

“Kecurangan politik yang paling sering terjadi di kelurahan pappang adalah Money Politik, hampir setiap pemilihan legislative selalu banyak tim sukses para calon yang membagikan uang agar pasangan mereka di pilih oleh masyarakat.”

Wawancara juga dilakukan dengan Adam (Tokoh Pemuda Kenje) yang mengatakan bahwa:

“Saya pribadi pernah mendapatkan uang dari calon legislative yang merupakan hal yang semua orang tahu itu salah, akan tetapi kami juga memerlukan uangnya meskipun ini bersifat memaksa dan menghamburkan uang, namun ini adalah resiko yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat karena memilih pemimpin tidak berdasarkan kualitas yang calon perlihatkan. Hal seperti ini terjadi karena rendahnya ilmu politik.”

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya dari masyarakat dan partai politik mengemukakan persepsi kurang baik mengenai pendidikan politik di kecamatan Campalagian dengan alasan bahwa partai politik belum pernah mengadakan sosialisasi tentang budaya politik yang baik sehingga menyebabkan kehidupan berdemokrasi masyarakat tidak berjalan dengan baik, pandangan masyarakat mengenai partai politik juga menjadi negative karena masyarakat menganggap bahwa partai politik hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan masyarakat hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya, partai politik sama sekali belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan pendidikan politik di kecamatan Campalagian, berdasarkan pendapat dari responden yang menganggap partai politik seharusnya yang menjadi penggerak dalam melaksanakan demokrasi dengan baik agar tidak ada lagi hal-hal seperti money politik, kampanye hitam, dan golongan putih disaat pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008:1173
- Ananingsi Sri Wahyuni, 2016. Tantangan dalam penganan dugaan politik politik uang pada pilkada serentak 2017. Masalah-masalah hukum, jilid 45, no, 1 hal 50.
- Arifin, M., Latief, A., Nadir, M., Al Yakin, A., & Dermawan, M. (2019, April). Internal Conflict of Political Parties Post Reform (Case Study of Conflict Romahurmuziy-Djan Faridz in United Development Party). In *1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR 2018)*. Atlantis Press.
- Sumarno, Yeni R Lukiswara, dan Miriam Budiarmo. *Pengantar Studi Ilmu Politik*.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Muhammad Arifin Nasution, 2012. Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal poleteia* Vol.4.No1.
- Rahmat, amaru Muftie, Iqbal syarifudin, 2018. Pengaruh pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi muda terhadap tingkat partisipasi pelaksanaan pemilihan umum, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* vol 4 Nomor 3.

Sumarno, Yeni R Lukiswara, dan Miriam Budiarjo.  
*Pengantar Studi Ilmu Politik.*  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  
2011 Tentang Partai Politik.